

# Manfaat Ekonomi Wisata Alam pada Pemenuhan Pengeluaran Rumah Tangga dan Konservasi Taman Nasional

## (Economic Benefits of Natural Tourism Activities to Fulfill Household Expenditure and Conservation of National Park)

Asti Istiqomah\*, Meti Ekayani, Nuva, Danang Pramudita, Bahroin Idris, Osmaleli

(Diterima Juni 2018/Disetujui Juni 2019)

### ABSTRAK

Perluasan area Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) tidak dapat dipisahkan dari adanya *trade off* antara kepentingan konservasi dan kepentingan ekonomi masyarakat. Salah satu alternatif solusi guna mengatasi masalah tersebut adalah dengan menerapkan kegiatan wisata alam di TNGHS. Hal ini juga diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam melestarikan taman nasional. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji peran wisata alam dalam menjaga fungsi konservasi taman nasional yang sekaligus dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di TNGHS. Metode analisis yang digunakan adalah analisis pendapatan yang mencakup *share* wisata pada pendapatan total serta seberapa besar penerimaan wisata dapat memenuhi pengeluaran rumah tangga dan konservasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat ekonomi wisata alam yang diperoleh masyarakat adalah sebesar 66% pada total pendapatan dan pendapatan tersebut dapat memenuhi sebesar 91% dari pengeluaran rumah tangga. Sementara itu, terdapat pula penerimaan wisata berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dapat memenuhi sebesar 343% dari dana konservasi.

**Kata kunci:** *covering* wisata, manfaat ekonomi, pendanaan konservasi, *share* wisata, TNGHS

### ABSTRACT

The broadening of Mount Halimun Salak National Park (TNGHS) area is unseparable from the trade off between conservation interest and community' economic interests. An alternative solution to overcome these problems is an action to conduct natural tourism activities in TNGHS. This action is also expected to encourage the participation of community in preserving national parks. The purpose of this study is to examine economic benefits of nature tourism for maintaining the function of conservation of national parks which at the same time can improve the community' economy in TNGHS area. The methods used are income analysis which includes ratio of economic benefits from tourism activity to total income and covering of economic benefits from tourism to household expenditure and to conservation fund. The results showed that the economic benefits from natural tourism activity obtained by the community was 66% of the total income and it could also fulfil 91% of household expenditure. In addition, ecotourism activities also generate tourism revenue which is called as PNBP as much as 343% of conservation funds.

**Keywords:** *covering* to household expenditure, conservation fund, economic benefits, share of tourism income, TNGHS

### PENDAHULUAN

Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS) merupakan kawasan konservasi yang berada di Provinsi Jawa Barat. Secara administratif, TNGHS mencakup tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Bogor, Sukabumi, dan Lebak, mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 282/Kpts-II/1992 pada tanggal 28 Februari 1992. Sebelum menjadi TNGHS, kawasan ini merupakan Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH) dengan luas 40.000 ha. Namun, dikarenakan kondisi sumber daya alam hutan yang mengalami ancaman kerusakan serta adanya dorongan dari para pihak yang peduli konservasi alam

maka TNGH diperluas dengan kawasan hutan Gunung Salak, Gunung Endut, dan kawasan sekitarnya yang merupakan hutan produksi terbatas dan hutan lindung yang dikelola Perum Perhutani. Pada tahun 2003, melalui SK Menteri Kehutanan No. 175/Kpts-II/2003, TNGH diperluas menjadi 113.357 ha dan berubah nama menjadi Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS).

Kawasan yang berubah fungsi menjadi kawasan konservasi karena perluasan TNGHS meliputi kawasan permukiman, lahan pertanian, dan area lainnya untuk melakukan aktivitas ekonomi (Hartono *et al.* 2007). Hal ini menyebabkan adanya *trade-off* antara kepentingan ekologi dan ekonomi. Dalam hal ini, Balai Konservasi Sumberdaya Hutan (BKSDH) memiliki kepentingan untuk konservasi atau memulihkan kembali fungsi ekologis di TNGHS, sedangkan masyarakat tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan atau mengekstraksi sumber daya hutan untuk memenuhi

Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan,  
Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor,  
Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680

\* Penulis Korespondensi: Email: [asti.istiqomah@gmail.com](mailto:asti.istiqomah@gmail.com)

kebutuhan ekonominya. Hal ini berpotensi adanya ancaman bagi kelestarian TNGHS jika masyarakat tetap mengekstraksi sumber daya hutan. Dengan demikian, diperlukan alternatif solusi yang dapat menjembatani antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan upaya konservasi.

Salah satu bentuk pemanfaatan taman nasional yang tidak bersifat eksploitatif adalah pemanfaatan untuk wisata alam (Halim 2016). Saat ini sektor wisata memiliki potensi yang besar ketika laju pertumbuhan PDB pariwisata lebih tinggi dibandingkan PDB nasional sejak tahun 2001 (Mudrikah *et al.* 2014). Di samping itu, wisata juga memberikan *multiplier effect* yang relatif besar (Arianti 2014; Hastuti & Diah 2018). Pengembangan wisata alam di kawasan konservasi diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi kawasan tersebut, di mana wisata alam dapat memberikan manfaat ekonomi berupa pendapatan dari unit usaha dan penyerapan tenaga kerja lokal tanpa mengganggu ekologis kawasan tersebut (Aryunda 2011; Ekayani & Nuva 2012; Ekayani *et al.* 2014; Martina 2014; Jelfi 2018). Sementara itu, penerimaan dari pengembangan wisata alam dapat dialokasikan oleh pengelola untuk konservasi dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar (Suprayitno 2008).

Pengembangan wisata alam pada dasarnya juga dapat mendorong partisipasi masyarakat (Hayati 2014; Rakatama 2008). Partisipasi masyarakat bisa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi (Andriyani *et al.* 2017). Salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah peningkatan kesadaran dan kontribusi masyarakat dalam kegiatan konservasi, terutama jika masyarakat telah memperoleh manfaat ekonomi yang besar. Masyarakat akan termotivasi untuk turut menjaga kelestarian TNGHS demi keberlangsungan penerimaan mereka dari kegiatan wisata alam, yang mutlak mengharuskan adanya keindahan dan kelestarian SDAL. Hal ini sesuai dengan konsep Pembayaran Jasa Lingkungan atau *Payment for Environmental Services/PES* (Pagiola *et al.* 2004; Ekayani *et al.* 2014b), di mana masyarakat sebagai pemberi jasa ekosistem berupa terjaganya kelestarian dan keindahan sumber daya alam dan lingkungan (SDAL), mendapat pembayaran dari wisatawan (Ekayani *et al.* 2014a).

Salah satu bentuk pembayaran jasa lingkungan yang dapat diterapkan pada kawasan wisata alam adalah pembayaran jasa lingkungan wisata alam. Dengan adanya pembayaran jasa lingkungan wisata alam dapat memberikan nilai tambah pada kawasan konservasi berupa manfaat ekonomi tanpa mengganggu kelestarian kawasan tersebut karena pemanfaatan ini tidak bersifat ekstraktif, melainkan memanfaatkan keindahan, dan kelestarian taman nasional (Suprayitno 2008). Dalam konsep pembayaran jasa lingkungan wisata alam, masyarakat sebagai pemberi jasa ekosistem berupa terjaganya kelestarian dan keindahan SDAL TNGHS mendapat pembayaran dari wisatawan sebagai pemanfaat kelestarian dan keindahan SDAL TNGHS tersebut.

Pemanfaatan jasa ekosistem wisata alam diharapkan mampu meminimalisir potensi kerusakan hutan yang dilakukan masyarakat. Apabila kegiatan wisata alam dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar dengan artian lainnya, yakni dapat memenuhi pengeluaran rumah tangganya maka masyarakat akan terdorong untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Hal ini dikarenakan manfaat ekonomi yang mereka peroleh dari kegiatan wisata alam sangat bergantung pada kelestarian sumber daya alam dan lingkungannya. Apabila sumber daya alam dan lingkungannya rusak maka kegiatan wisata alam menjadi tidak menarik lagi bagi wisatawan dan akan berdampak pada penurunan jumlah kunjungan. Penurunan jumlah kunjungan tentunya akan berpengaruh pada pendapatan masyarakat tersebut. Dengan demikian, kelestarian alam merupakan modal utama dalam keberlanjutan wisata alam dan kelangsungan pendapatan masyarakat tersebut. Wisata alam tidak hanya memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar (ILO 2012), namun dapat pula memberikan kontribusi dana bagi konservasi taman nasional (Lindberg 1996; Ekayani & Nuva 2012).

Pengelolaan kawasan TNGHS saat ini berada di bawah kewenangan Balai Konservasi Sumber Daya Hutan (BKSDH). Semenjak pengembangannya, banyak masyarakat yang telah merasakan manfaat dari keberadaan wisata alam TNGHS. Namun, pengembangan wisata tidak secara otomatis memberikan dampak ekonomi yang signifikan (Isna 2004; Subadra & Nadra 2006). Dengan demikian, perlu dikaji seberapa besar manfaat ekonomi kegiatan wisata alam yang diperoleh pihak-pihak yang memberikan jasa kelestarian ekosistem dan seberapa besar manfaat ekonomi dapat memenuhi pengeluaran rumah tangga, serta potensi kontribusi pada dana konservasi. Objek wisata alam TNGHS yang saat ini memiliki tingkat kunjungan yang cukup tinggi adalah Gunung Bunder, Curug Cigamea, dan pemandian air panas.

## METODE PENELITIAN

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di kawasan TNGHS, wilayah Kabupaten Bogor. Lokasi wisata yang dijadikan sampel penelitian adalah Curug Cigamea dan Pemandian Air Panas (Desa Gunung Sari,) serta Kawah Ratu (Desa Gunung Bunder). Sampel lokasi wisata ditentukan secara *purposive*, yaitu yang mewakili beberapa jenis wisata di TNGHS. Waktu penelitian dilaksanakan pada Maret–November 2015.

### Metode Pengambilan Sampel

Responden yang diambil dalam penelitian ini adalah pelaku usaha dan tenaga kerja terkait wisata alam di ketiga objek wisata di TNGHS. Penentuan sampel responden dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu responden yang terlibat dalam kegiatan wisata alam TNGHS dan keterwakilan jenis usaha dan pekerjaan terkait wisata alam tersebut. Responden

diambil masing-masing dari ketiga objek wisata lokasi penelitian (Tabel 1).

### Metode Analisis

Pendapatan masyarakat yang memiliki unit usaha (pelaku usaha) di kawasan wisata diestimasi dari selisih antara penerimaan dari kegiatan wisata alam dengan total biaya usaha baik biaya variabel maupun biaya tetap. Selanjutnya, dicari *share* pendapatan wisata pada total pendapatan. Rumus penentuan besarnya *share* pendapatan wisata adalah sebagai berikut:

$$\pi_w = TR_w - TC_w$$

$$TC_w = TVC_w + TFC_w$$

$$\text{Share pendapatan wisata} = \frac{\pi_w}{\pi_t} \times 100\%$$

Keterangan:

- $\pi_w$  = Pendapatan dari unit usaha di lokasi wisata (Rp/tahun)  
 $TR_w$  = Total penerimaan dari unit usaha di lokasi wisata (Rp/tahun)  
 $TC_w$  = Total biaya usaha di lokasi wisata (Rp/tahun)  
 $TVC_w$  = Total biaya variabel usaha di lokasi wisata (Rp/tahun)  
 $\pi_t$  = Pendapatan total (Rp/tahun)

*Covering* pada pengeluaran rumah tangga (RT) masyarakat yang terlibat wisata dihitung untuk mengetahui sejauh mana kegiatan wisata dapat mencukupi kebutuhan hidup masyarakat tersebut. Rumus *covering* pengeluaran RT dari wisata adalah sebagai berikut:

$$I = \frac{\pi_w}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

- I = *Covering* pengeluaran RT (%)  
 B = Pengeluaran RT (Rp/tahun)

*Covering* terhadap kegiatan konservasi TNGHS dihitung untuk melihat sejauh mana kegiatan wisata dapat memenuhi kebutuhan kelestarian TNGHS.

Rumus *covering* biaya konservasi TNGHS dari penerimaan Balai TNGHS (BTNGHS) adalah:

$$Q = \frac{P}{C} \times 100\%$$

Keterangan:

- Q = *Covering* biaya konservasi TNGHS (%)  
 P = Penerimaan BTNGHS (Rp/tahun)  
 C = Biaya Konservasi (Rp/tahun)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Manfaat ekonomi tidak dapat ditampilkan sebagai manfaat utama dari berkembangnya wisata (Aryunda 2011; Lumi *et al.* 2016; Khrisnamurti *et al.* 2016), termasuk wisata alam di kawasan konservasi. Manfaat ekonomi, terutama bagi masyarakat di sekitar TNGHS dinyatakan sebagai manfaat utama yang dirasakan *stakeholder* di Desa Gunung Sari dan Gunung Bunder dengan frekuensi jawaban 71% (Tabel 2). Manfaat ekonomi yang dirasakan *stakeholder* berupa pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Manfaat lain kegiatan wisata adalah manfaat lingkungan yang dirasakan oleh 21% *stakeholder* di Gunung Sari dan 28% *stakeholder* di Gunung Bunder. Manfaat lingkungan yang dirasakan dengan adanya wisata alam antara lain adalah berupa program kerja sama dalam kegiatan wisata melalui penanaman kembali lokasi yang gundul di Kawasan TNGHS. Di samping itu, manfaat lingkungan yang dirasakan adalah berkurangnya aktivitas yang bersifat ekstraktif pada hutan (menebang kayu). Manfaat sosial hanya dirasakan oleh *stakeholder* di Desa Gunung Sari yang menyatakan dengan adanya kegiatan wisata mendorong aktivitas pendidikan dan penelitian untuk keberlanjutan Kawasan TNGHS.

Manfaat ekonomi yang telah diperoleh masyarakat mendorong mereka untuk berkontribusi dalam pelestarian kawasan TNGHS. Beberapa upaya pelestarian sudah dilakukan oleh masyarakat dan pengelola di Kawasan TNGHS berupa penanaman pohon dan menjaga kebersihan lingkungan (Tabel 3). *Stakeholder* di Desa Gunung Sari dan Gunung Bunder sudah melakukan upaya penanaman pohon pada jalur-jalur

Tabel 1 Jumlah responden di tiga lokasi wisata Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS)

Lokasi wisata	Jumlah responden (orang)	
	Pelaku usaha	Tenaga kerja
Gunung Bunder	32	10
Curug Cigamea	32	12
Pemandian Air Panas	31	10
Total	95	32

Tabel 2 Manfaat utama kegiatan wisata Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS)

Manfaat	<i>Stakeholder</i> Desa Gunung Sari (%)	<i>Stakeholder</i> Desa Gunung Bunder (%)
Manfaat ekonomi	71,43	71,43
Manfaat lingkungan	21,43	28,57
Manfaat sosial	7,14	-
Total	100,00	100,00

tertentu yang dekat dengan lokasi wisata. *Stakeholder* di kedua lokasi itu juga menyatakan bahwa mereka turut serta menjaga lingkungan dengan cara memelihara kebersihan di sekitar area wisata. Aktivitas lain yang dilakukan *stakeholder* pengelola bekerja sama dengan masyarakat di Gunung Sari untuk melestarikan kawasan TNGHS adalah dengan cara menawarkan paket wisata pendidikan serta melakukan sosialisasi atau penyuluhan mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya untuk wisatawan. Selain itu, perilaku masyarakat sekitar pada penjagaan kelestarian sumber daya alam di TGHS juga ditunjukkan oleh adanya pola perubahan perilaku dari yang semula cenderung merusak ke perilaku yang sadar lingkungan. Sebagai contoh, awalnya berburu burung di TNGHS untuk dijual, kini beralih sebagai pemandu ekowisata pengamatan burung yang peduli dengan terjaganya populasi burung di TNGHS (Ekayani & Nindyantoro 2013).

**Share Pendapatan Wisata pada Total Pendapatan Masyarakat**

Kegiatan wisata alam di Kawasan TNGHS sangat bergantung pada kualitas kelestarian aset di kawasan tersebut, seperti air terjun dan sumber air panas. Selain itu, untuk menjamin kenyamanan pengunjung yang sekaligus tetap memerhatikan kelestarian lingkungan, beragam fasilitas wisata juga tersedia yang umumnya dikelola masyarakat sebagai penyedia jasa wisata. Wisatawan dapat melaksanakan aktivitas wisata di TNGHS dengan lebih nyaman karena lengkapnya jasa wisata yang disediakan. Sementara masyarakat sebagai penyedia jasa wisata mengharapkan adanya manfaat ekonomi sebagai konsekuensi dari pengeluaran wisatawan di lokasi wisata. Masyarakat yang menyediakan jasa wisata berperan sebagai pelaku usaha dan atau tenaga kerja pada unit usaha di lokasi wisata (Fachry *et al.* 2010).

Secara umum, pendapatan dari kegiatan wisata sudah menjadi bagian penting dari pendapatan rumah tangga dengan rata-rata *share* pendapatan wisata pada pendapatan total sebesar 66,33% (Tabel 4). Nilai *share* ini termasuk kategori yang tinggi (Sundari *et al.*

2012), di mana sebesar >50% pendapatan rumah tangga masyarakat bergantung pada kegiatan wisata. Selanjutnya, besaran penghasilan dari kegiatan wisata dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga yang dilihat berdasarkan rata-rata *covering* pendapatan wisata pada kebutuhan rumah tangga di lokasi penelitian juga menunjukkan persentase yang besar, yaitu mencapai sebesar 90,70%. Dengan demikian, dapat disimpulkan pendapatan dari kegiatan wisata alam di TNGHS sudah diandalkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Masyarakat menawarkan jasa wisata secara reguler maupun *occasional* baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai tenaga kerja. Karakteristik usaha tersebut menunjukkan struktur nafkah dari masyarakat di sekitar kawasan wisata. Karakteristik usaha reguler di ketiga lokasi didominasi oleh warung makanan, sedangkan untuk usaha yang sifatnya *occasional* didominasi oleh usaha asongan dan pedagang dadakan lainnya setiap akhir pekan. Rata-rata pendapatan wisata yang diperoleh per bulan lebih besar pada karakteristik pelaku usaha reguler untuk ketiga lokasi, sedangkan pendapatan wisata untuk pelaku usaha *occasional* nilainya lebih sedikit (Tabel 5). Pendapatan wisata yang diperoleh di Curug Cigamea nilainya lebih besar dibandingkan dengan dua lokasi lainnya.

Secara umum, pendapatan masyarakat yang bekerja di sektor wisata di Curug Cigamea dan Pemandian Air Panas memberikan *share* lebih dari 50% pada total pendapatan rumah tangga, sedangkan di kawasan wisata Gunung Bunder *share* pendapatan wisata pada pendapatan total masih kurang dari 50% (Tabel 6). Berdasarkan standar yang digunakan untuk menentukan jenis pendapatan utama, suatu aktivitas wisata dikatakan sebagai pendapatan utama (sangat tinggi) jika mampu menyumbang sebesar 75% dari pendapatan total rumah tangga (Sundari *et al.* 2012). Mengacu pada kriteria tersebut, maka hanya pelaku usaha *regular* di Curug Cigamea yang dapat dikategorikan pendapatan utama rumah tangganya. Pendapatan pelaku usaha dari wisata di Pemandian Air Panas dan Gunung Bunder masih dikategorikan sebagai pendapatan sampingan.

Tabel 3 Upaya pelestarian Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) yang dilakukan oleh masyarakat

Jenis upaya	Persentase pelaksanaan (%)	
	Desa Gunung Sari	Desa Gunung Bunder
Penanaman pohon	44,44	80,00
Paket wisata/pendidikan	11,11	-
Kebersihan lingkungan	27,78	20,00
Sosialisasi	16,67	-
Total	100,00	100,00

Tabel 4 *Share* pendapatan wisata dan *covering* kebutuhan rumah tangga di lokasi penelitian

Komponen	Curug Cigamea	Air Panas	Gunung Bunder	Rata-rata lokasi
Pendapatan wisata (Rp)	1.706.991	1.031.708	1.221.944	1.320.215
Pendapatan total (Rp)	2.391.384	1.523.583	2.055.741	1.990.236
Pengeluaran rumah tangga (Rp)	1.452.820	1.090.658	1.823.366	1.455.615
<i>Share</i> pendapatan wisata pada pendapatan total (%)	71,38	67,72	59,44	66,33
<i>Covering</i> pendapatan wisata pada pengeluaran RT (%)	117,50	94,60	67,02	90,70

Tabel 5 *Share* pendapatan wisata pelaku usaha pada pendapatan total

Lokasi	Jenis pelaku usaha	Pendapatan wisata (Rp/bulan)	Pendapatan total (Rp/bulan)	<i>Share</i> wisata terhadap pendapatan total (%)
Curug Cigamea	<i>Reguler</i>	2.608.368	3.135.799	83,18
	<i>Occasional</i>	1.087.500	1.906.250	57,05
Pemandian Air Panas	<i>Reguler</i>	1.053.333	1.838.333	57,30
	<i>Occasional</i>	909.074	1.673.889	54,31
Gunung Bunder	<i>Reguler</i>	704.722	1.906.111	36,97
	<i>Occasional</i>	436.667	1.636.667	26,68

Tabel 6 *Share* pendapatan wisata tenaga kerja pada pendapatan total

Lokasi	Jenis tenaga kerja	Pendapatan wisata (Rp/bulan)	Pendapatan Total (Rp/bulan)	<i>Share</i> wisata terhadap pendapatan total (%)
Curug Cigamea	<i>Reguler</i>	1.300.000	1.700.000	76,47
	<i>Occasional</i>	360.000	1.685.000	21,36
Pemandian Air Panas	<i>Reguler</i>	1.150.000	1.335.000	86,14
	<i>Occasional</i>	-	-	-
Gunung Bunder	<i>Reguler</i>	2.005.000	2.005.000	100,00
	<i>Occasional</i>	2.000.000	2.750.000	72,73

Pendapatan dari sektor wisata yang diperoleh tenaga kerja sebagian besar mencapai lebih dari 75% sehingga untuk tenaga kerja wisata dapat dikatakan sebagai sumber pendapatan utama rumah tangga di ketiga lokasi wisata, khususnya untuk tenaga kerja dengan curahan waktu *regular*. *Share* dari wisata yang kecil terdapat di Curug Cigamea untuk tenaga kerja *occasional*. Tenaga kerja *occasional* di Curug Cigamea adalah penjaga warung dan penjaga toilet, karena mereka bekerja secara *occasional*, umumnya mereka mempunyai pendapatan di luar wisata yang jauh lebih besar.

Pembayaran jasa lingkungan semestinya mampu memberikan *benefit sharing* bagi berbagai pihak (Loft *et al.* 2014). Ukuran, jenis, dan waktu manfaat yang didistribusikan melalui mekanisme berbasis kinerja di sektor sumber daya alam, seperti PES memengaruhi hasil dalam hal perubahan penggunaan lahan (Engel *et al.* 2008; Börner & Vosti 2013). *Benefit sharing* menjadi aspek yang penting untuk mengklarifikasi siapa yang memiliki hak untuk mendapat manfaat dari penyediaan layanan ekosistem dan juga siapa yang dapat dimintai tanggung jawab atas kegagalan menyediakannya (Loft *et al.* 2014). Berdasarkan hasil estimasi *share* pendapatan, dapat dikatakan bahwa masyarakat sekitar yang terlibat dalam kegiatan wisata telah mendapatkan manfaat (*benefit sharing*). Namun, di TNGHS ini belum ada kelembagaan khusus yang mengelola serta pemanfaatan dana yang tidak secara khusus dipisahkan untuk konservasi dalam artian sempit, yakni berupa perbaikan SDAL kawasan wisata. Walaupun demikian, *benefit sharing* yang telah diterima oleh masyarakat tersebut berdampak pada konservasi dalam arti luas, yakni masyarakat akan menjaga atau tidak merusak ataupun mengesktraksi SDAL yang merupakan modal alam (*social capital*) yang utama dari kegiatan wisata alam.

#### **Pemenuhan (Covering) Pengeluaran Rumah Tangga Masyarakat dari Wisata Alam**

Masyarakat yang bekerja di wisata alam TNGHS memenuhi pengeluaran rumah tangganya tidak hanya

dari pendapatan yang diperoleh dari kegiatan wisata, tapi juga dari pendapatan kegiatan non-wisata (Tabel 7). Berdasarkan data pada Tabel 8, rumah tangga di Pemandian Air Panas dan Curug Cigamea mempunyai *covering* pendapatan yang cukup besar dari pengeluaran rumah tangga sebesar >70%). Sementara itu, pelaku usaha di Kawasan Gunung Bunder mempunyai *covering* pendapatan pada pengeluaran rumah tangga yang relatif rendah, yaitu sebesar <40%. Data ini menunjukkan bahwa pengeluaran rumah tangga di ketiga lokasi, kecuali untuk pelaku usaha *regular* di Curug Cigamea, masih perlu ditopang oleh pendapatan di luar sektor wisata.

Pada tenaga kerja *occasional*, *covering* pendapatan wisata pada pengeluaran rumah tangga lebih kecil dibandingkan tenaga kerja *regular*. Sebagian besar tenaga kerja di lokasi penelitian mempunyai *covering* pendapatan pada pengeluaran rumah tangga kurang dari 100%. Dengan demikian, sebagian besar tenaga kerja di lokasi penelitian belum bisa memenuhi kebutuhan rutin rumah tangga jika hanya mengandalkan dari kegiatan wisata. Hanya tenaga kerja di Pemandian Air Panas yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga seluruhnya dari wisata. Tenaga kerja yang tidak mempunyai pendapatan di luar kegiatan wisata mereka harus melakukan upaya adaptasi di antaranya berhutang, menjadi makelar untuk penyewaan villa atau menjaga parkir sewaktu-waktu. Dengan demikian, secara umum untuk tenaga kerja, tingkat kebergantungan pada pendapatan wisata lebih tinggi dibandingkan pelaku usaha yang ditunjukkan oleh *share* pendapatan wisata yang lebih besar.

Berdasarkan hasil estimasi *covering* kebutuhan rumah tangga masyarakat dari kegiatan wisata alam, dapat dikatakan bahwa *benefit sharing* yang diperoleh masyarakat sudah hampir memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga masyarakat sehingga pendapatan dari kegiatan wisata sudah diandalkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Khusus untuk wisata Curug Cigamea sudah terpenuhi kebutuhan rumah tangganya sebesar 117,50%, sedangkan untuk wisata Air Panas dapat memenuhi pengeluaran

Tabel 7 *Covering* pendapatan wisata pada pengeluaran rumah tangga pelaku usaha

Lokasi	Jenis pelaku usaha	Pendapatan wisata (Rp)	Pengeluaran rumah tangga (Rp/bulan)	<i>Covering</i> pendapatan wisata pada pengeluaran rumah tangga (%)
Curug Cigamea	<i>Reguler</i>	2.608.368	1.664.889	156,67
	<i>Occasional</i>	1.087.500	1.489.375	73,02
Pemandian Air Panas	<i>Reguler</i>	1.053.333	1.182.000	89,11
	<i>Occasional</i>	909.074	1.009.963	90,01
Gunung Bunder	<i>Reguler</i>	704.722	1.858.542	37,92
	<i>Occasional</i>	436.667	1.138.333	38,36

Tabel 8 *Covering* pendapatan wisata pada pengeluaran rumah tangga pelaku usaha

Lokasi	Jenis tenaga kerja	Pendapatan wisata (Rp)	Pengeluaran rumah tangga (Rp/bulan)	<i>Covering</i> pendapatan wisata pada pengeluaran rumah tangga (%)
Curug Cigamea	<i>Reguler</i>	1.300.000	1.221.200	73,06
	<i>Occasional</i>	360.000	1.330.000	27,07
Pemandian Air Panas	<i>Reguler</i>	1.150.000	1.111.133	103,50
	<i>Occasional</i>	-	-	-
Gunung Bunder	<i>Reguler</i>	2.005.000	2.089.000	95,98
	<i>Occasional</i>	2.000.000	2.190.000	91,32

rumah tangga sebesar 94,60%, dan untuk wisata Gunung Bunder baru dapat memenuhi pengeluaran rumah tangga sebesar 67,02%.

### Pemenuhan (*Covering*) Biaya Konservasi dari Wisata Alam

Kelestarian sumber daya alam di wisata alam harus dipertahankan karena tanpa kelestarian dan keindahan alam maka wisata alam tidak akan ada. Dalam hal ini, pembayaran jasa lingkungan (PES) wisata alam dapat menjadi solusi yang dapat mengakomodir kepentingan ekologi dan ekonomi. BKSDH merupakan pihak yang memiliki kewenangan mengelola dan menjaga kelestarian alam Kawasan TNGHS. BKSDH dan masyarakat di TNGHS dapat saling mendukung, bersama-sama menjaga kelestarian TNGHS untuk keberlangsungan jasa lingkungan berupa wisata alam. Dengan menjaga kelestarian TNGHS, BKSDH semestinya memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan wisata alam yang dapat dialokasikan untuk konservasi. Menghitung kontribusi kegiatan wisata alam TNGHS bagi BKSDH dapat diestimasi dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP pada tahun 2013 yang diperoleh dari kegiatan wisata alam dan jasa lingkungan TNGHS secara keseluruhan mencapai ± Rp380 juta, dan meningkat pada tahun 2014 dan 2015 sebesar 98 dan 57% dibandingkan pada tahun 2013 (Gambar 1).

PNBP dari kegiatan wisata dan pemanfaatan jasa lingkungan di Kawasan TNGHS dihasilkan dari beberapa Resort. Besar kontribusi dari setiap *resort* sangat bergantung pada jenis atraksi wisata dan karakteristik keanekaragaman hayati yang dimiliki. *Resort* yang terbesar penyumbang PNBP/penerimaan bagi BKSDH adalah *Resort* Salak II karena dalam kawasannya mayoritas merupakan lokasi keberadaan wisata alam.

Penerimaan PNBP Wisata dan Jasa Lingkungan yang besar menggambarkan bahwa kegiatan wisata di TNGHS memberikan kontribusi yang besar bagi

pengelola kawasan TNGHS. Pemanfaatan TNGHS khususnya untuk wisata dan jasa lingkungan tentunya memerlukan biaya untuk menjaga, merawat, melakukan kegiatan konservasi, dan mengelola kawasan tersebut agar jasa lingkungan yang ditawarkan tetap lestari. BKSDH pada umumnya melakukan dua kegiatan besar untuk mengkonservasi kawasan TNGHS, yaitu kegiatan rutin berupa perapihan jalur wisata, inventaris flora dan fauna, konservasi mata air, dan kegiatan insidental yang sangat bergantung pada karakteristik wilayah wisatanya. Kegiatan rutin yang dilakukan oleh BKSDH, khususnya BTNGHS, dalam setahunnya membutuhkan dana sebesar ± Rp850 juta.

Setiap *resort* dalam TNGHS mengeluarkan biaya konservasi rutin yang berbeda-beda. Kawasan *Resort* Kawah Ratu, Salak I, dan Cikaniki memiliki biaya yang lebih besar dibandingkan dengan *Resort* Salak II (Tabel 9). Hal ini disebabkan karena Kawah Ratu, Salak I, dan Cikaniki memiliki karakteristik flora dan fauna yang khas (elang jawa, owa, dan macan tutul), dan masih terdapat ancaman/gangguan dari pihak luar terhadap kawasan *resort*. Sementara itu, untuk *Resort* Salak II biaya konservasi ini dititik beratkan kepada kegiatan konservasi terkait jasa lingkungan seperti air dan tegakan pohon.

Hasil perbandingan besaran penerimaan wisata dan jasa lingkungan berupa PNBP dengan kebutuhan biaya konservasi rutin menunjukkan bahwa kegiatan wisata dapat memberikan kontribusi yang cukup untuk kegiatan konservasi kawasan TNGHS (Tabel 9). Namun, skema pemanfaatan yang diterima oleh BTNGHS dari hasil PNBP perlu menjadi perhatian. Harapannya manfaat yang ditimbulkan dari kegiatan pemanfaatan wisata dapat kembali berkontribusi pada kegiatan konservasi alam tempat wisata berada.

Rasio antara biaya konservasi rutin dengan penerimaan PNBP, memperlihatkan kebutuhan biaya konservasi yang dapat ditutupi dari penerimaan PNBP sektor wisata dan jasa lingkungan. Pada tahun 2015, biaya konservasi rutin *Resort* Salak II dapat tertutupi



Gambar 1 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) wisata dan jasa lingkungan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) pada tahun 2013–2015.

Tabel 9 *Covering* pendapatan wisata (PNBP) pada kebutuhan biaya konservasi rutin pada tahun 2015

<i>Resort</i>	Kebutuhan biaya konservasi rutin/tahun (juta Rp)	PNBP (juta Rp)	<i>Covering</i> (%)
Salak II	120	411,61	343%
Kawah Ratu	240	61,14	25%
Salak I	240	264,78	110%
Cikanikl	240	365,01	152%

sebesar 343% dari penerimaan PNBP jika memang seandainya terdapat skema yang memungkinkan memanfaatkan dana PNBP secara langsung. Secara umum, *Resort* Salak II memang memiliki banyak objek wisata yang populer dan ramai dikunjungi oleh pengunjung sehingga penerimaan PNBP *resort* ini berkontribusi besar. Sisi kebutuhan biaya konservasi untuk *Resort* Salak II ini relatif lebih kecil dibandingkan yang lain karena terdapat perbedaan karakteristik flora dan fauna serta ancaman yang dihadapi. Hal berbeda dihadapi oleh *Resort* Kawah Ratu, di mana *resort* ini seperti masih lebih besar daripada *Resort* Salak II di mana PNBPnya hanya dapat menutupi sekitar 25% dari kebutuhan biaya konservasi rutinnya sebesar Rp240 juta. Biaya konservasi dalam kajian ini hanya mencakup kegiatan konservasi yang rutin dilaksanakan oleh BTNGHS, tidak termasuk kegiatan-kegiatan konservasi yang bersifat insidental pada tiap tahunnya.

## KESIMPULAN

Pemanfaatan kawasan konservasi TNGHS untuk aktivitas wisata alam telah memberikan *benefit sharing* kepada masyarakat. Manfaat ekonomi dari wisata alam yang diperoleh masyarakat cukup tinggi yang ditunjukkan oleh besar *share* pendapatan wisata pada total pendapatan sebesar 66% serta dapat memenuhi 91% dari pengeluaran rumah tangga. Adanya manfaat ekonomi juga telah mendorong masyarakat sekitar untuk berpartisipasi dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan yang pada akhirnya dapat mendukung keberlanjutan wisata alam di TNGHS. Selain itu, manfaat ekonomi yang diperoleh pengelola TNGHS adalah penerimaan wisata dan jasa lingkungan berupa PNBP, yang dapat dialokasikan untuk biaya konservasi TNGHS. Namun, belum ada kelembagaan khusus dalam mekanisme pembayaran

jasa lingkungan wisata alam yang dapat memastikan bahwa dana yang diperoleh dialokasikan untuk konservasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani A, Martono E, Muhamad. 2017. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata dan Implikasinya terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*. 23(1): 1–16. <https://doi.org/10.22146/jkn.18006>
- Arianti D. 2014. Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian dan Keruangan Kota Bukittinggi (Pendekatan Analisis Input Output). *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*. 2(3): 183–196. <https://doi.org/10.14710/jwl.2.3.183-196>
- Aryunda H. 2011. Dampak Ekonomi Pengembangan Kawasan Ekowisata Kepulauan Seribu. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. 22(1): 1–16.
- Ashley C, De Brine P, Lehr A, Wilde H. 2007. The Role of the Tourism Sector in Expanding Economic Opportunity. Corporate Social Responsibility Initiative Report No. 23. Kennedy School of Government. Cambridge (EN): Harvard University.
- Börner J, Vosti SA. 2013. Managing tropical forest ecosystem services: An overview of options. In Muradian R and Rival L, eds. *Governing the Provision of Ecosystem Services*. Dordrecht, the Netherlands: Springer. 21–46. [https://doi.org/10.1007/978-94-007-5176-7\\_2](https://doi.org/10.1007/978-94-007-5176-7_2)
- Eagles, P.F.J. 2002. Trends in Park Tourism: Economics, Finance and Management. *Journal of*

- Sustainable Tourism*. 10: 132–153. <https://doi.org/10.1080/09669580208667158>
- Engel S, Pagiola S, Wunder S. 2008. Designing payments for environmental services in theory and practice: an overview of the issues. *Ecological Economics*. 65: 663–674. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2008.03.011>
- Ekayani M, Nuva, Nurrochmat DR. 2014. Promoting Co-Benefits of Ecotourism as A Complementary Strategy for Sustainable Gunung Halimun Salak National Park Management. The International Forestry Review (XXIV IUFRO World Congress). 16(5).
- Ekayani M, Nindyantoro. 2013. Pembayaran Jasa Lingkungan Wisata Alam sebagai Alternatif Solusi *trade off* Kepentingan Ekologi dan Ekonomi di Taman Nasional Halimun Salak. Laporan Akhir Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi.
- Ekayani M, Nuva. 2013. Economics of Ecotourism (book chapter) in Kim, Seong-il, Mihee Kang and Dian Sukmajaya (eds) 2013. Opportunities and challenges of ecotourism in ASEAN countries. Seoul (KR): Jungmin Publishing Co.
- Ekayani M, Nuva. 2012. Could Ex-Situ Conservation Play Effective Role to Bridge Ecotourism and Biodiversity? Case of Multipurpose Management of Bogor Botanic Garden, Indonesia. *Proceeding of Ecotourism Research Symposium: Ecotourism for Global Peace (book chapter)*. Seoul (KR): Marubooks Publishing Co Republic of Korea.
- Ekayani M, Nuva, Yasmin R, Shaffitri LR, Tampubolon BI. 2014a. Taman nasional untuk siapa? Tantangan membangun wisata alam berbasis masyarakat di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*. 1(1): 46–52. <https://doi.org/10.20957/jkebijakan.v1i1.10279>
- Fachry ME, Made S, Halim IS. 2010. Dampak Obyek Wisata Wakatobi *Dive Resort* terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Desa Lamanggau Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. 5(1): 1–13.
- Ekayani M, Nuva, Yasmin R, Sinaga F, Maaruf LO. 2014b. Wisata alam Taman Nasional Gunung Halimun Salak: solusi kepentingan ekologi dan ekonomi. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*. 19(1): 29–37.
- Halim LF. 2016. Pengelolaan dan Potensi Ekowisata di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. *Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian Agrika*. 2(2):
- Hayati N. 2014. Wisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*) di Desa Tompobulu Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. *Info Teknis EBONI*. 11(1): 45–52.
- Hartono T, Kobayashi H, Widjaya H, Suparmo M. 2007. Taman Nasional Gunung Halimun-Salak: “Menyingkap kabut Gunung Halimun-Salak (Unveil the mist of Gunung Halimun-Salak).” JICA-Gunung Halimun-Salak National Park Management Project, Bogor (ID): 48 pp.
- Hastuti P, Diah I. 2018. Analisis dampak wisata kampung pelangi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sekitar (pedagang) di Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*. 4(1): 29–35.
- [ILO] International Labour Organization. 2012. Strategic plan: sustainable tourism and green job for Indonesia (Geneva: ILO).
- Isna A. 2004. Dampak Sosial Ekonomi Pengembangan Sektor Pariwisata Di Desa Karangbanjar Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Pembangunan Pedesaan*. 4(1):
- Khrisnamurti H, Utami R, Darmawan. 2016. Dampak Pariwisata terhadap Lingkungan di Pulau Tidung Kepulauan Seribu. *Kajian Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan*. 21(3): 257–273.
- Lumi VN, Manoppo VEN, Wasak MP. 2016. Dampak Pariwisata terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado. *Akulturas: Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan*. 4(7):
- Loft L, Thuy PT, Luttrell C. 2014. Lessons from Payments for Ecosystem Services for REDD+ Benefit-Sharing Mechanisms. Info Brief No. 68, March 2014. [www.cifor.org/publications/pdf\\_files/.../4488-infobrief.pdf](http://www.cifor.org/publications/pdf_files/.../4488-infobrief.pdf)
- Martina S. 2014. Dampak pengelolaan taman wisata alam kawah putih terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. *Jurnal Pariwisata*. 1(2): 81–89
- Mubyarto. 1994. Pengantar Ekonomi Pertanian. Jakarta (ID): Penerbit LP3S.
- Mudrikah A, Sartika D, Yuniarti R, Ismanto, Satia AB. 2014. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap GDP Indonesia Tahun 2004–2009. *Economics Development Analysis Journal*. 3(2): 367–371.
- Pagiola S, Agostini P, Gobbi J, De Haan C, Ibrahim M, Murgueitio E, Ramirez E, Rosales M, Ruiz JP. 2004. *Paying for Biodiversity Conservation Services in Agricultural Landscape*. Washington DC (US): The World Bank. [https://doi.org/10.1659/0276-4741\(2005\)025\[0206:PFBCS\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1659/0276-4741(2005)025[0206:PFBCS]2.0.CO;2)
- Rakatama A. 2008. Kontribusi Aktivitas Wisata Alam di Taman Nasional Way Kambas Terhadap Perekonomian Setempat. *Info Hutan*. 5(1): 89–98
- Subadra IN, Nadra NM. 2006. Dampak ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan pengembangan desa wisata di Jatiluwih-Tabanan. *Jurnal Manajemen Pariwisata*. 5(1): 46–63.

- Sundari H, Andewi, Zulfanita, Panuntun UD. 2012. Kontribusi Usahatani Ubi Jalar (*Ipomoea Batatas L.*) terhadap Pendapatan Rumah Tangga Petani di Desa Ukirsari Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo. *Jurnal Surya Agritama*. 1(2): 35–45.
- Suprayitno. 2008. *Teknik Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam*. Bogor (ID): Departemen Kehutanan Pusat DIKLAT Kehutanan.
- Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. <http://pih.kemlu.go.id/files/UU%20RI%20NO%2005%20TAHUN%201990.pdf>